



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 100.3.2 /SIG /PO. HUKUM -G.57 /2025

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Selain Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Perangkat Daerah dapat mengajukan Peraturan Gubernur mengenai:
- a. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2026;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun 2026; dan
 - c. Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Perangkat Daerah Pengusul menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lambat untuk dilakukan pengharmonisasian tanggal 30 September 2026.

- KEEMPAT : Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak dapat diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh Fasilitasi sebagai dasar penetapan menjadi Peraturan Gubernur.
- KELIMA : Perangkat Daerah yang mengusulkan Rancangan Peraturan Gubernur di luar program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diproses Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 DESEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 100.3.2 /Sig /Po.Hukum - 0.57 /2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKS ANAAN	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
			BARU	UBAH		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Standar Pelayanan Publik	Baru		TW I	Biro Organisasi
2.	Pedoman Pengelolaan Keuangan Kegiatan Swakelola di Pemerintah Sulawesi Tengah	Pedoman Pengelolaan Keuangan Kegiatan Swakelola di Pemerintah Sulawesi Tengah	Baru		TW I	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	Baru		TW I	Biro Organisasi

4.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan	- pengembangan potensi pemuda - Penghargaan penyelenggaraan kepemudaan - Kordinasi dan kemitraan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan - Pengawasan keolahragaan	Baru		TW I	Dinas Pemuda dan Olahraga
5.	Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian provinsi sulawesi tengah	Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian provinsi sulawesi tengah	Baru		TW I	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
6.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Baru		TW I	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
7.	Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Baru		TW 1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB)	Trantibunlinmas Penanggulangan Bencana	Baru		TW 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Baru		TW I	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	- Arah kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan difokuskan pada peningkatan produksi tanaman, pengembangan perkebunan kelapa sawit, pemantapan penguatan korporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan kelapa sawit. - Integrasi program dan kegiatan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan meliputi penguatan data, koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapabilitas dan kapasitas pekebun; pengolahan dan	Baru		TW I	Dinas Perkebunan dan Peternakan

		pemantauan lingkungan; tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan dukungan percepatan ISPO serta peningkatan akses pasar produk kelapa sawit. - Penyelenggaraan, pelaksanaan dan sistematika rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit.				
11.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2026	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2026	Baru		TW I	Dinas Perhubungan

12.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Berdasarkan Hasil Kerjasama Daerah Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Berdasarkan Hasil Kerjasama Daerah Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW I	BAPENDA
13.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	Baru		TW I	BPKAD
14.	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah		Ubah	TW II	Biro Organisasi
15.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Perubahan SOTK Dinas Pemuda dan Olahraga		Ubah	TW II	Biro Organisasi

16.	Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2030	Kordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di provinsi sulawesi tengah	Baru		TW II	Dinas Pemuda dan Olahraga
17.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok	- Sanksi administratif - Tata cara pemberian penghargaan - Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan tugas KTR dan hubungan tata cara kerja dengan unit satuan tugas KTR	Baru		TW II	Dinas Kesehatan
18.	Perikanan Gurita Berkelanjutan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Provinsi Sulawesi Tengah	Perikanan Gurita Berkelanjutan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW II	Dinas Kelautan dan Perikanan
19.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Baru		TW II	Dinas Pangan

20.	Program Berani Berdering Tahun 2025 - 2029	Berani Berdering Tahun 2025 - 2029	Baru		TW II	DISKOMINFO
21.	Analisis Standar Belanja	Analisis Standar Belanja Fisik dan Non Fisik	Baru		TW II	BPKAD
22.	Cetak Biru Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan	Cetak Biru Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan	Baru		TW II	ESDM
23.	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga	Baru		TW II	DP3A
24.	Perubahan atas Pergub Nomor 62 Tahun 2013 tentang Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah	Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah	Baru		TW II	DP3A
25.	RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2027	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Baru		TW III	BAPPEDA

26.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026	RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026		Ubah	TW III	BAPPEDA
27.	Penerapan Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Daerah	Baru		TW III	BRIDA
28.	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah	- Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Daerah - Peran Serta Masyarakat Terhadap Inovasi Daerah - Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Inovasi Daerah	Baru		TW III	BRIDA
29.	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan dan Pajak Alat Berat Tahun 2026	Dasar perhitungan baru PKB, BBNKB, dan PAB	Baru		TW III	BAPENDA
30.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah	Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah		Ubah	TW III	BAPENDA

31.	Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW IV	Biro Organisasi
32.	Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Budaya Kerja BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Baru		TW IV	Biro Organisasi
33.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan	Delegasi perda no 1 tahun 2024	Baru		TW IV	Dinas Kesehatan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID